

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran atau memperkecil angka kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional bahwa tujuan pembangunan pariwisata mencakup a) pengembangan dan perluasan diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional, b) berbasis dalam pemberdayaan masyarakat, kesenian dan pesona alam dengan memperhatikan kelestarian seni budaya tradisional dan kelestarian lingkungan hidup, juga c) mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Kepariwisataan Indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dimasa yang akan datang. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, agar sumber daya dan modal kepariwisataan dimanfaatkan dengan optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan sebagai peningkatan dalam pendapatan nasional, memperluas dan membuka kesempatan berusaha dalam lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia dalam rangka menimbulkan rasa cinta tanah air (Anom, I putu, 2013:112). Berdasarkan undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa pariwisata tidak hanya memperkuat ekonomi sebuah negara juga menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air sehingga mampu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan kementerian pariwisata (2018) jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu tumbuh sekitar 13.2 persen pada tahun 2008 dan mulai meningkat sekitar 1.4 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 7.2 persen tumbuh diatas rata-rata negara lain yang hanya 4.4 persen. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh menjadi 14.3 juta kunjungan dimana keberhasilan ini merupakan dedikasi, komitmen, strategi, dan teori pengembangan sektor pariwisata yang dijalankan. Sayangnya keberhasilan ini tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5.07 persen meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perbaikan peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pertumbuhan pariwisata masih lebih tinggi peningkatannya.

Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan terganggunya pada rantai pasok global, dalam negeri, pasar keuangan, permintaan konsumen serta dampak negtif di sektor utama yang salah satunya ialah perjalanan dan pariwisata. Dampak dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh diseluruh rantai nilai pariwisata, perusahaan kecil dan menengah disektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif (Sugihamretha, 2020). Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia awal tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bulan Desember 2019

sebanyak 1.37 juta. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan jumlah kunjungan yang disebabkan karena penyebaran Covid-19 yang terjadi di akhir Januari 2020.

Adanya pembatasan sosial ini mengakibatkan kemacetan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial dan politik. Sektor pariwisata adalah merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini (Skare et al., 2020). Saat ini telah diperkirakan 75 juta lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata mengalami gangguan dan industri pariwisata beresiko kehilangan omsetnya lebih dari 2,1 triliun US \$ (WTTC, 2020). Di Indonesia, tekanan terhadap sektor pariwisata dapat dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu total kunjungan wisman pada Januari-Mei 2020 sebesar 2,9 juta menurun 53,36 persen dari tahun sebelumnya yang berada sebesar 6,3 juta kunjungan (BPS, 2020). Hal yang sama juga terjadi pada wisatawan domestik, terutama masyarakat Indonesia yang takut untuk melakukan perjalanan, karena timbulnya rasa khawatir terhadap dampak dari Covid-19 (Kartiko, 2020). Penurunan yang terjadi terhadap sektor pariwisata berdampak pada usaha UMKM dan lapangan kerja. Selama ini sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yang menampung banyak tenaga kerja (Sanaubar et al., 2017). Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkarekraf) telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk memperbaiki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan ekspor dan digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif (*ekraf*) menjadi salah satu langkah pemertintah, sehingga diharapkan dapat memulihkan kepariwisataan nasional.

Pariwisata halal adalah suatu kegiatan perjalanan atau rekreasi guna mencari mencari kebahagiaan yang tidak berlawanan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran

islam, dan juga dari awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah *subhanahu wa ta'ala* (Sucipto, 2014). Konsep halal tersebut berpatokan pada aturan syariat Islam membuat ketentuan itu berlaku secara universal walaupun berbeda negara. Oleh sebab itu, masyarakat muslim dari penjuru dunia manapun akan memiliki kebiasaan yang sama terutama dalam melakukan perjalanan dan juga dalam hal mengkonsumsi suatu produk dan jasa.

Berpatokan pada salah satu program yang mendorong meningkatnya jumlah wisatawan di Indonesia yaitu pengembangan wisata halal yang berdaya saing, sehingga dapat menggaet pasar timur tengah. Hal tersebut juga dapat mengembangkan pariwisata Indonesia yang mengedepankan dan menjunjung tinggi budaya serta nilai-nilai islami dengan melaksanakan wisata halal. Sama halnya dengan wisata pada umumnya, yang membedakan wisata halal berada pada fasilitas dan pelayanan yang mengedepankan sesuai dengan syariat islam agar memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Adapun pengertian dari wisata halal ialah salah satu wujud wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai norma dan syari'at islam sebagai pegangan utamanya menurut Gilang Widagdyo (2015). Menurut Adriani, et.al (Jaelani, 2017) pariwisata halal bukan hanya menunjang fasilitas dan destinasi wisata yang menyediakan sesuai dengan syari'at islam melainkan juga sebagai destinasi wisata yang nyaman dan ramah bagi wisatawan muslim maupun non muslim, sehingga semua kalangan dapat menikmati keindahan, pelayanan serta daya tarik objek wisata.

Wisata halal tidak hanya di selenggarakan di Indonesia, perkembangan wisata halal sudah terjadi secara global dan banyak diminati oleh berbagai negara baik

negara dengan mayoritas masyarakat beragama islam maupun negara dengan mayoritas non-muslim. Perkembangan wisata halal telah menyentuh di berbagai negara industri wisata seperti negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut sedang berlomba-lomba dalam menyelenggarakan wisata halal sebagai salah satu jenis wisata untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (Pratiwi et al., 2018). Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia dapat berlangsung dengan baik karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, jumlah penganut agama islam di Indonesia mencapai 86,7% dari populasi di Indonesia.

Promosi pariwisata Provinsi Sumatera Barat terus digencarkan dengan berharap adanya kunjungan wisatawan nusantara di masa pandemi Covid-19. Orientasi Pemprov sampai akhir tahun 2020 masih tetap pada wisatawan lokal, regional dan nusantara (Novrial dalam bisnis, 2 Oktober 2020). Dia menyatakan sesuai dengan perencanaan disusun Menko Marvest dan Menparekraf sebelumnya, dengan panduan pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin maka pariwisata di era kenormalan baru lebih menargetkan wisatawan nusantara. Sembari menunggu adanya regulasi dan memantau situasi Covid-19 yang masih terjadi, Dispar Sumbar akan terus mengupayakan *marketing communication* melalui media sosial, untuk menjaga ingatan orang tentang Sumatera Barat dan potensinya.

Berdasarkan catatan laporan Kementerian Pariwisata tahun 2015 diketahui bahwa terdapat 13 provinsi yang bersedia untuk menjadi destinasi wisata halal “*halal tourism*” (Satriana & Faridah, 2018). Sumatera Barat termasuk dalam salah satu provinsi yang siap dan bersedia untuk melaksanakan wisata halal. Hal ini berhubungan dengan prinsip masyarakat Sumatera Barat yang menjunjung tinggi

nilai adat istiadat yang kental dengan nuansa islam yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Nilai adat istiadat tersebut menjadi identitas budaya masyarakat Sumatera Barat yang dapat mendorong untuk melaksanakan wisata halal.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang penerapan wisata halal terhadap pariwisata. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing.”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Dinas Pariwisata Kota Padang adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing.

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan magang di atas penulis menyimpulkan manfaat yang di dapat adalah:

1. Bagi Penulis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang perkembangan pariwisata di Indonesia khususnya Kota Padang.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan tentang perkembangan pariwisata.

2. Bagi Akademisi

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dijadikan sebagai pembelajaran dan kajian dimasa mendatang terkait Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing

3. Bagi Praktisi

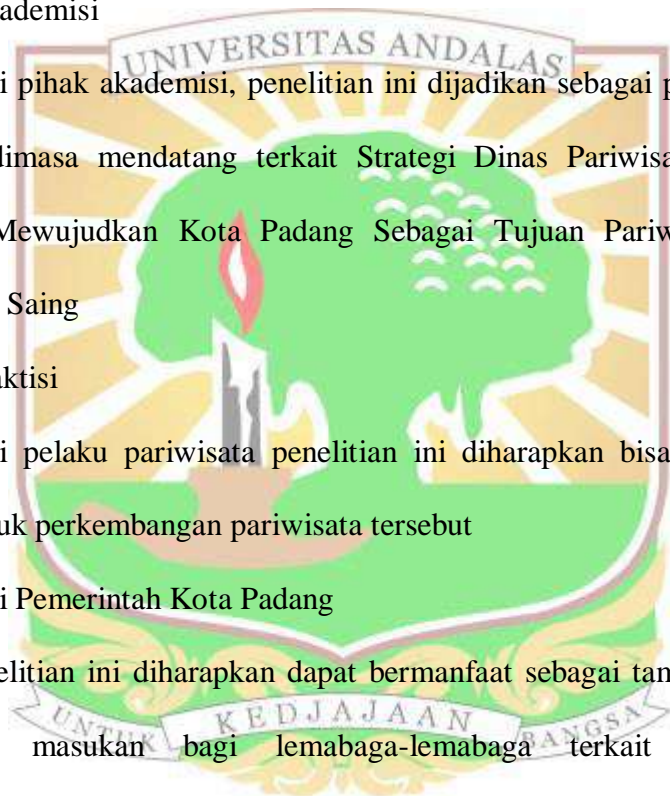
Bagi pelaku pariwisata penelitian ini diharapkan bisa sebagai sumber data untuk perkembangan pariwisata tersebut

a) Bagi Pemerintah Kota Padang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga terkait dalam bidang perkembangan pariwisata di Kota Padang.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan sehingga memberikan pemahaman yang lebih tentang dunia pariwisata di Indonesia khususnya Kota Padang.



1.5 Metode

Penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan judul tugas akhir penulis yaitu Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 40 hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan menganalisis hasil observasi dan wawancara tentang strategi dinas pariwisata dalam mewujudkan pariwisata halal dan berdaya saing. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan kasi promosi pariwisata. Selain itu, dengan cara melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, merekam, mencatat, dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan mengenai bagaimana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing. Dan juga dengan melakukan studi pustaka melalui sumber-sumber literatur.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu hanya berfokus mengenai Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing.

1.7 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis memilih instansi tempat magang yaitu pada Dinas Pariwisata Kota Padang yang beralamat di Gandaria No.56, Jati

Baru, Kec. Padang Timur., Kota Padang, Sumatera Barat 25129. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada proposal tugas akhir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan tugas akhir. Manfaat dari penulisan tugas akhir, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori terdiri dari pengertian pariwisata, pengertian pariwisata halal dan karakteristik pariwisata halal.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab gambara umum instansi berisi tentang uraian gambaran umum pada Dinas Pariwisata Kota Padang, tentang visi misi, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan, yaitu pembahasan tentang

Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Mewujudkan Kota Padang Sebagai Tujuan Pariwisata Halal dan Berdaya Saing.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil pembahasan dan pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis yang diharapkan dapat bermanfaat.

